

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi permasalahan stunting karena pada dasarnya fungsi-fungsi pemerintahan berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Fungsi pemerintahan dilihat dari beberapa peran utamanya yaitu fungsi pelayanan, fungsi pengaturan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pengawasan (Nurdin & Hartati, 2024). Fungsi tersebut tidak hanya memberikan pelayanan akan tetapi dalam aspek pengaturan kebijakan, edukasi masyarakat dan pengawasan terhadap pelaksanaan program di lapangan.

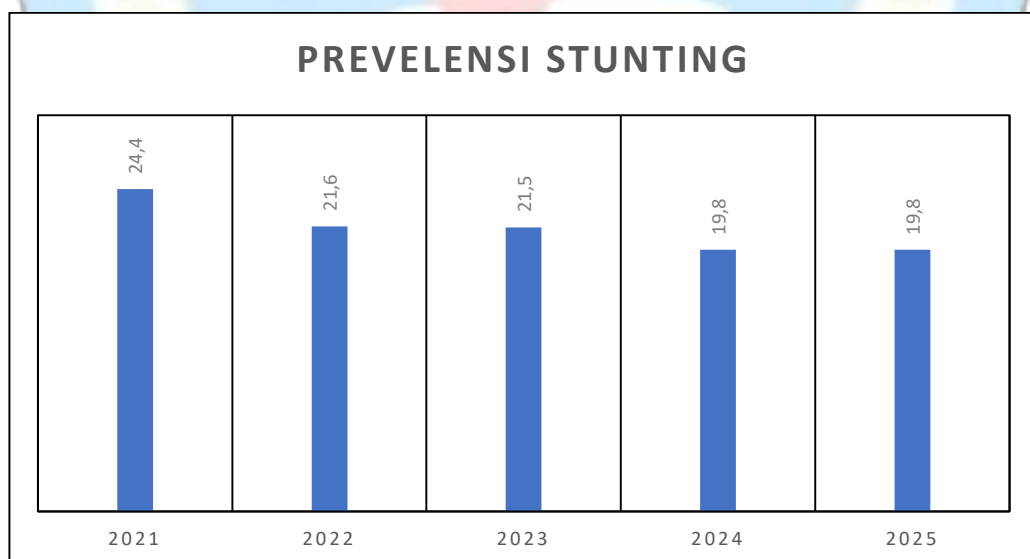
Pemerintah memiliki peran dalam memastikan bahwa setiap anak memiliki asupan gizi yang cukup, layanan kesehatan yang layak, dan lingkungan yang mendukung dalam tumbuh kembang anak (Ramlan, 2025). Pelaksanaan fungsi pemerintahan pun menjadi cerminan tata Kelola yang baik karena melihat bagaimana kerjasama antara Pemerintah, tenaga kesehatan serta masyarakat.

Pentingnya peran pemerintah dalam permasalahan stunting ini juga berkaitan dengan tanggung jawab Negara dalam menjamin hak dasar warga Negara yaitu hak untuk hidup sehat dan tumbuh secara layak. Pemerintah sendiri memiliki peran untuk memastikan bahwa seluruh anak yang ada di Indonesia mendapatkan asupan gizi dan layanan kesehatan yang memadai tanpa terkendala oleh faktor wilayah dan ekonomi. Stunting merupakan kondisi dimana seorang anak kekurangan gizi yang terjadi pada 1000 hari setelah kelahiran.

Hal tersebut berlangsung lama sehingga menghambat tumbuh kembang serta pertumbuhan otak pada anak. Anak yang terkena stunting pertumbuhannya lebih lambat, tubuh anak yang terkena stunting juga beda dengan anak yang kebutuhannya tercukupi. Biasanya anak yang terkena stunting badannya lebih kecil dan tinggi badannya lebih pendek (Dachlan, 2023).

Masalah balita stunting masih menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam permasalahan di bidang kesehatan (Yuda, 2023). Stunting menimbulkan dampak fisik dengan jangka Panjang karena anak yang mengalami kekurangan gizi kronis tidak mendapatkan asupan yang diperlukan untuk tumbuh kembang anak. Hal tersebut menyebabkan tinggi badan anak cenderung lebih pendek dari anak pada anak yang sehat. Anak yang mengalami stunting cenderung lebih mudah untuk terkena penyakit karena memiliki daya tahan tubuh yang lemah.

Gambar 1. 1 Prevelensi Stunting Nasional Tahun 2021-2025



Sumber: SKI Kemenkes 2021-2023 dan SSGI 2025

Walaupun data mengalami penurunan dari 2021-2024, Indonesia masih memiliki masalah yang besar karena masih perlu percepatan dan penguatan program di daerah yang tertinggal. Hal ini menjadi permasalahan yang serius bagi Indonesia, Karena banyak anak yang mengalami tumbuh kembang yang tidak normal sehingga beresiko mengalami gangguan hingga masa dewasa dan kesehatan yang kurang optimal (Lailiyah, 2023).

Tabel 1. 1 Data Prevelensi Stunting Kabupaten Lingga Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025
Prevelensi Stunting	%	7,44	6,53	8,51	6,77

Sumber: Dinkes PPKB Kabupaten Lingga, 2024 dan Dinkes PPKB, 2026

Stunting telah menjadi isu penting di setiap wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Lingga yang telah mencatat 8,51% atau sekitar 464 anak yang terkena stunting, Hal ini menjadi salah permasalahan serius yang perlu dihadapi oleh Kabupaten Lingga dengan kenaikan angka stunting menggambarkan bahwa program BKB (Bina Keluarga Baita) belum berjalan secara optimal. Kondisi wilayah Kabupaten Lingga yang terdiri dari banyak pulau membuat Sebagian masyarakat sulit untuk mengakses layanan Kesehatan seperti pemantauan tumbuh kembang anak (Sriyanah, 2021).

Tercatat bahwa capaian stunting di Kabupaten Lingga dari tahun 2022-2024 mengalami kenaikan. Dari 13 kecamatan yang ada di kabupaten Lingga ada 5255 balita yang diukur dan terdapat 464 anak (8,51) yang mengalami stunting, yang terdiri dari 1,91 anak sanga pendek dan 6,90 anak pendek, Data di atas

menunjukkan permasalahan yang serius di Kabupaten Lingga. Menurut Perbup (Peraturan Bupati) Lingga Nomor 123 Pasal 5 terkait percepatan penurunan stunting menyebutkan bahwa target yang harus di capai yaitu sebesar 8% (Perbup, 2022), bisa di lihat bahwa angka stunting pada 2024 sudah melampaui target dari Peraturan Bupati Lingga.

Kabupaten Lingga menjadi salah satu daerah prioritas untuk penurunan stunting, melalui program intervensi gizi pada 1000 hari pertama pada balita, Gizi spesifik seperti pemberian makanan tambahan, suplementasi, serta imunisasi, Serta intervensi gizi sensitive seperti perbaikan sanitasi, perbaikan air bersih dan penguatan jaminan social (Sa'adah et al., 2025). Akan tetapi program yang di jalankan belum cukup baik, karena banyak wilayah terpencil yang tidak dapat dijangkau. Karna adaptasi terhadap ekonomi, sosial dan wilayah menentukan implementasi program.

Dampak stunting dengan jangka Panjang akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang ada di masa yang akan mendatang. Program penurunan stunting yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lingga dan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana (Dinkes PPKB) yaitu bertujuan untuk membuat sumber daya manusia yang berkualitas dan menuju Indonesia emas (Suseno et al., 2021). Masyarakat yang sehat, sejahtera dan berdaya saing, Ini terjadi karna ada peningkatan hidup adalah aspek penting dari masyarakat yang berkualitas mulai dari Kesehatan, Pendidikan dan ekonomi.

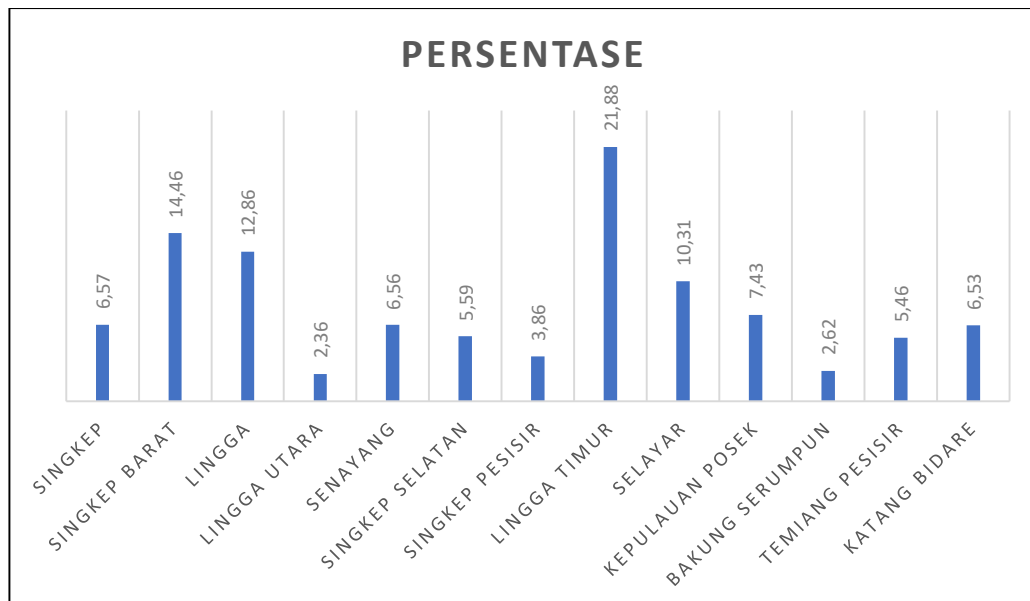
Dampaknya tidak hanya membuat anak tumbuh lebih pendek tetapi dapat mengganggu perkembangan kecerdasan dan Kesehatan jangka panjang. Karena itu,

masalah stunting di Kabupaten Lingga perlu mendapatkan perhatian yang serius dan penanganan yang lebih terarah agar kualitas hidup masyarakat lebih sejahtera (Kinter & Sherman, 2021).

Permasalahan gizi yang ada di Kabupaten Lingga pada umumnya dikarenakan faktor ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. kekurangan protein dan energi dalam jangka Panjang dapat menghambat tumbuh kembang anak, khusus gizi merupakan khusus yang sangat rumit juga penting untuk segera ditangani dan dapat ditangani sewaktu masih janin, bayi, remaja hingga lanjut usia. Kekurangan protein dan energi pada ibu hamil serta pada balita, kemungkinan akan terkena stunting. Balita bisa dikatakan stunting atau kerdil jika pertumbuhan badan tidak sesuai dengan umur (Murni & Yuza, 2026).

Selain pemenuhan gizi, peran orang tua juga harus sering melakukan pemantauan kepada anak, dengan melakukan penimbangan badan, pengukuran tinggi badan setiap satu bulan sekali, hal tersebut dilakukan untuk mengetahui anak terkena stunting atau tidak. Karena tingkat pengetahuan ibu kepada anaknya di rumah lebih peka, hal tersebut menekankan bahwa seorang ibu lebih paham apa yang baik dikonsumsi di rumah.

Gambar 1. 2 Data Persentase Stunting Per Kecamatan 2024



Sumber: Elektronik Pencatatan Dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PGBM), 2024

Data persentase stunting per kecamatan diatas juga menunjukkan adanya perbedaan yang cukup besar pada beberapa wilayah, Kecamatan Lingga Timur mencatat angka prevelensi stunting tertinggi atau sekitar 63 anak yang mengalami stunting. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa implementasi program penurunan stunting belum berjalan secara merata dibeberapa daerah di Kabupaten Lingga terkusus di Kecamatan Lingga Timur.

Dengan tingginya angka stunting yang ada di Kecamatan Lingga Timur menggambarkan bahwa permasalahan yang ada di Kecamatan Lingga Timur lebih serius dibandingkan dengan Kecamatan lainnya. Tingginya angka stunting di wilayah tertentu menunjukkan adanya permasalahan baik dari aspek gizi, kesehatan

ataupun lingkungan dan pola asuh yang tidak tepat, sehingga wilayah tertentu perlu penanganan yang serius.

Kondisi Kecamatan Lingga Timur ikut mempengaruhi keterbatasan akses layanan kesehatan, pemerataan implementasi program, pemantauan dan pembinaan kepada orang tua yang masih kurang, sehingga berdampak pada keberhasilan implementasi program penurunan stunting. Tingginya angka stunting di Kecamatan Lingga Timur tidak hanya disebabkan oleh buruknya faktor gizi dan pola asuh kepada balita, akan tetapi sangat berkaitan dengan pelaksanaan implementasi program penurunan stunting yang belum optimal (Nurmayanti et al., 2024).

Persentase ini tidak hanya menggambarkan kondisi gizi kronis pada anak-anak di wilayah Kecamatan Lingga Timur tetapi juga mencerminkan tantangan yang lebih luas yang dihadapi Kabupaten Lingga. Sebagai daerah kepulauan Kabupaten Lingga memiliki hambatan geografis yang cukup besar seperti tidak merata tenaga medis tidak mempumpuni di daerah terpencil seperti di Kecamatan Lingga Timur.

Dengan tingginya angka stunting pada tahun 2024, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) menjalankan program Program Bina Keluarga Balita (BKB). Program BKB adalah program yang berasal dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang dijalankan di Kecamatan Lingga Timur Kabupaten Lingga terkhusus di Kecamatan Lingga Timur. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) adalah pelaksana utama di Kabupaten Lingga Kecamatan Lingga Timur. Program BKB ada dibawah naungan Dinas Kesehatan Pengendalian

Peduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) yang dibantu oleh kader BKB dan Penyuluh KB dari Balai Penyuluhan KB yang dibawah naungan Dinkes PPKB, adapun layanan dari program BKB (BinaKeluarga Balita) menurut Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2018 tentang pengelolaan Bina Keluarga Balita (BKB):

1. Penyuluhan
2. Pemantauan tumbuh kembang anak
3. Kunjungan rumah
4. Rujukan

Program BKB (Bina Keluarga Balita) berlandaskan pada peraturan Kepala BKKBN nomor 12 Tahun 2018 tentang pengelolaan BKB (Bina keluarga balita). Program BKB ini dijalankan dengan memanfaatkan sumber manusia yang ada dan memberikan pelatihan pola asuh, penyuluhan, dan pemantauan tumbuh kembang pada masyarakat khususnya pada ibu yang memiliki anak yang terkena stunting (Yanti et al., 2023).

Pelaksanaan program BKB di Kecamatan Lingga Timur masih menghadapi kendala. Meskipun program tersebut dibuat untuk mempercepat penurunan stunting seperti meningkatkan pemahaman orang tua dalam mengasuh anak balita dan membantu keluarga dalam pemahaman pemenuhan gizi yang tepat kepada anak. Akan tetapi, Implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala karena cakupan sasaran program masih terbatas dan belum mampu menjangkau seluruh keluarga beresiko.

Implementasi Program BKB di Kabupaten Lingga khususnya di Kecamatan Lingga Timur menunjuk kan beberapa permasalahan nyata yang secara tidak langsung menghambat keberhasilan implemenasi program penurunan stunting. pertama, Pemahaman orang tua yang masih rendah menjadi penghambat dari pelaksanaan program. Kedua, sumber daya pelaksana dalam program belum terpenuhi secara optimal. Ketiga, kurangnya tempat pendukung dalam pelaksanaan program. Keempat, Standar Operasional Prosedur yang belum sampai ke tingkat bawah. Kelima, kendala penyampaian informasi ketingkat pelaksana (Firmansyah, 2024). Berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwasannya Implementasi Program Penurunan Stunting masih memerlukan penguatan sumber daya manusia, sarana prasarana, kualitas pelayanan, serta sistem pencatatan dan pelaporan.

Urgensi pada penelitian ini yaitu masih tingginya dan meningkatnya prevelensi stunting di Kabupaten Lingga terkhusus, terutama pada tahun 2024 dengan capaian 8,51% dan angka tersebut sudah melewati target daerah yaitu sebesar 8% sebagaimana sudah di tetapkan pada Peraturan Bupati Lingga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program penurunan stunting yang telah di khususnya pada program BKB belum di jalankan dengan optimal.

Penelitian mengenai impelementasi program penurunan stunting oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga menjadi penting untuk di lakukan mengingat tingginya angka kasus stunting serta beragamnya tantangan geografs, sosial, dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana program BKB telah berjalan dalam mendukug penurunan stunting. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana pelaksanaan program

bisa menjangkau masyarakat secara merata terutama pada wilayah yang sulit di jangkau.

Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menyoroti upaya penanganan dan pencegahan stunting dari sisi teknis kesehatan dan biomedis, seperti pemenuhan gizi, edukasi makanan sehat, serta intervensi layanan kesehatan di tingkat dasar (Nabila, 2024). Namun, kajian yang secara khusus membahas implementasi program penurunan stunting oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga masih sangat terbatas. Padahal Kabupaten Lingga merupakan wilayah kepulauan yang menghadapi beragam hambatan implementatif, mulai dari akses layanan kesehatan yang sulit, keterbatasan sumber daya, hingga minimnya koordinasi lintas sektor di beberapa wilayah.

Penelitian sebelumnya juga belum melihat secara mendalam bagaimana pelaksanaan program BKB dijalankan di lapangan serta bagaimana empat indikator implementasi menurut George C. Edward III komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan (*Research Gap*) tersebut melalui Implementasi Program BKB di Kabupaten Lingga terkhusus di Kecamatan Lingga Timur, dan belum ada yang mengkaji program BKB di Kecamatan Lingga Timur. Penelitian ini guna melihat sejauh mana program berjalan sesuai tujuan yang telah di targetkan. Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi program penurunan stunting yang dijalankan oleh

Dinkes PPKB Kabupaten Lingga. Melalui teori George C. Edward III, penelitian ini melihat bagaimana empat aspek utama komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi berperan dalam menentukan keberhasilan program BKB.

Selain itu, penelitian ini juga menelaah bagaimana hambatan geografis wilayah kepulauan, keterbatasan tenaga kesehatan, keterbatasan sarana prasarana, serta koordinasi lintas sektor memengaruhi keberhasilan program di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat hasil pelaksanaan program, tetapi juga memahami bagaimana proses implementasi berlangsung dan faktor apa saja yang mendukung maupun menghambat upaya penurunan stunting di Kecamatan Lingga Timur Kabupaten Lingga.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Program Bina Keluarga Balita oleh Dinas Kesehatan pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Khususnya di Kecamatan Lingga Timur Tahun 2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk melihat bagaimana Implementasi program Bina Keluarga Balita oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga di Kecamatan Lingga Timur Tahun 2025.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini akan memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu pemerintahan, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan dan manajemen program pemerintah daerah. Hasil dari penelitian ini memperbanyak pemahaman tentang bagaimana kebijakan nasional dan daerah di implementasikan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Kelurga Berencana (Dinkes PPKB):

Sebagai bahan evaluasi bagi Dinkes PPKB Kabupaten Lingga dalam implementasi program penurunan stunting. Menajadi referensi bagi Pemerintah Daerah dan Dinkes PPKB Kabupaten Lingga dalam menilai sejauh mana implementasi program penurunan stunting telah berjalan.

2. Balai Penyuluhan KB dan kader BKB Kecamatan Lingga Timur:

Memberikan panduan dan rekomendasi perbaikan terkait pelaksanaan pendamping ibu dan balita, serta penguatan edukasi gizi kepada masyarakat.

3. Tim Percepatan Penurunan stunting (TPPS):

Membantu dalam memahami pola koordinasi lintas sector yang belum optimal, sehingga kolaborasi dengan desa, tenaga gizi, dan instansi lain dapat di perbaiki.

4. Pemerintah Desa:

Memberikan informasi mengenai peran Desa dalam mendukung implementasi program, seperti memastikan keterlibatan masyarakat, mendukung kegiatan posyandu, dan mengawasi keluarga berisiko stunting.

5. Masyarakat kususnya keluarga beresiko stunting:

Secara tidak langsung membantu masyarakat mendapatkan edukasi yang lebih baik, karena penelitian ini mendorong peningkatan kualitas implementasi program.

